## BAB I PENDAHULUAN

* 1. **MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**
     1. **Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

* + - 1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

* + - 1. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

* + - 1. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

* + - 1. Menyedikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah
      2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,
      3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
      4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan,
      5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
      6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
      7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, , pendapatan LO, dan beban. Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Landasan hukum Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

* + 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8);
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
    15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
    16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.

## SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

## Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan keuangan

## Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

## Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

## Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas

## Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Bab VII Penutup

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

* 1. **EKONOMI MAKRO**

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Cilacap dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 akan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan.

## KEBIJAKAN KEUANGAN

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten cilacap mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

* + 1. **Dasar Hukum**

Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan:

* + - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
      2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
      3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
      4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020.

## Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Kegiatan** | **Anggaran** |
| 1. | Pengembangan Sistem dan Sarana Persampahan di  Daerah kabupaten/Kota | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 399.200.000 |
|  |  | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS | 2.462.135.000 |
|  |  | Pengendalian Sarana Persampahan | 778.400.000 |
|  |  | Pembinaan Teknik Pengelolaan  Infrastruktur Persampahan | 318.592.000 |
| 2. | Program Perencanaan,Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja  Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.000 |
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 |
| 3 | Program Administrasi  Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan  ASN | 8.425.399.218 |
| 4 | Program Administrasi Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | 152.550.000 |
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  berdasarkan tuga dan fungsi | 0 |
| 5 | Program Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 129.670.000 |
|  |  | Penyediaan bahan logistic Kantor | 151.700.000 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan  Penggandaan | 60.000.000 |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan komsultasi SKPD | 167.596.000 |
| 6 | Pengadaan Barang milim  Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | 196.684.000 |
| 7 | Program Penyediaan Jasa  Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa  Komunikasi.Sumber daya air dan Listrik | 294.996.000 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  Kantor | 4.199.991.580 |
| 8 | Program Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa  Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau  Lapangan | 861.586.000 |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | 60.000.000 |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung  kantor dan bangunan lainnya | 120.044.000 |
| 9 | Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)  kabupaten/kota | Penyusunan dan Pelaporan RPPLH Kabupaten / kota | 100.000.000 |
|  |  | Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten / kota | 155.000.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Program Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stratergis (KLHS)  Kabupaten/kota | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | 119.000.000 |
| 11 | Program Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media  tanah,air,udara dan Laut | 1.630.946.000 |
|  |  | Koordinasi.Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi gas rumah kaca.Mitigasi dan  adaptasi perubahan iklim | 320.000.000 |
|  |  | Pengelolaan Laboratorium  Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 713.098.700 |
| 12 | Program Pemulihan  Pencemaran dan/atau  Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / kota | Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi | 414.430.000 |
| 13 | Program Penyimpanan sementara Limbah B3 | Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system  pelayanan perizinan berusaha terintergasi secara elektronik | 6.784.000 |
| 14 | Program Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota | Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah provinsi dalam rangka  Pengangkutan,Pemanfaatan,Pengol ahan,dan /atau Penimbunan | 1.551.000.000 |
| 15 | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH  diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 35.300.000 |
|  |  | Pengawasan Usaha dan/atau  kegiatan yang izin Lingkungan Hidup.Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  / kota | 52.671.200 |
| 16 | Program Penyelenggaraan Pendidikan.Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga  Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapsitas dan Kopentensi Sumber daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 36.000.000 |
|  |  | Pendampingan Gerakan Peduli  Lingkungan Hidup | 163.221.900 |
| 17 | Program Penyelesaian  Pengaduan Masyrakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup (PPLH) Kab/kota | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabuoaten / kota | 19.050.000 |
| 18 | Program Pengelolaan Sampah | Penyusunan Kebijakan dan Strategi  Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota | 288.850.000 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Penanganan Sampah dengan Melakukan pemilahan,Pengumpulan,pengangk utan,pengolahan dan Pemprosesan  akhir sampah di TPA/TPST.SPA Kabupaten/Kota | 6.974.000.000 |
|  |  | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan  Persampahan | 80.000.000 |
|  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di  TPA/TPST/SPA kabupaten/kota | 1.850.000.000 |
| **Jumlah** | | | **33.314.895.598** |

## BAB III

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

* 1. **IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Berikut disajikan realisasi / capaian program / kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi Anggaran (Rp)** | **Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3))** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah**  **Kabupaten/Kota** | **3.958.327.000** | **3.689.490.646** | **93,21** |
|  | -Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS | 399.200.000 | 396.767.000 | 99,39 |
|  | -Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-  3R/TPS | 2.462.135.000 | 2.214.139.296 | 89.93 |
|  | -Penyediaan Sarana Persampahan | 778.400.000 | 769.712.100 | 98,88 |
|  | - Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | 318.592.000 | 308.872.250 | 96,95 |
| 2 | **Program Perencaaan,Penganggaran**  **dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **27.000.000** | **26.630.000** | **98,63** |
|  | -Penyusunan Dokumen Perencanaan  Perangkat Daerah | 12.000.000 | 11.750.000 | 97,92 |
|  | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 14.880.000 | 99,20 |
| 3 | **Program Administrasi Keuangan**  **Perangkat Daerah** | **8.425.399.218** | **8.069.753.814** | **95,78** |
|  | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.425.399.218 | 8.069.753.814 | 97,78 |
| 4 | **Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **152.550.000** | **151.718.400** | **99,45** |
|  | Pengadaan Pakaian dinas beserta  atributnya | 152.550.000 | 151.718.400 | **99,45** |
|  | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Program Adminitrasi Umum**  **Perangkat Daerah** | **508.966.000** | **463.926.703** | **91,15** |
|  | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.670.000 | 120.556.920 | 92,97 |
|  | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 151.700.000 | 148.293.500 | 97,75 |
|  | -Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 29.445.950 | **49.08** |
|  | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  dan Konsultasi SKPD | 167.596.000 | 165.630.333 | 98,83 |
| 6 | **Program Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan**  **Pemerintah Daerah** | **196.684.000** | **180.719.000** | **99,88** |
|  | - Pengadaan Peralatan dan mesin  lainnya | 196.684.000 | 180.719.000 | 91,88 |
| 7 | **Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **.4.494.987.580** | **4.272.666.160** | **95,05** |
|  | -Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber  daya air dan Listrik | 294.996.000 | 207.012.384 | **70,17** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  Kantor | 4.199.991.580 | 4.065.653.776 | 96,80 |
|  |  |  |  |  |
| 8 | **Program Barang milik Daerah**  **penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.041.630.000** | **.997.646.228** | **95,80** |
|  | - Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan  kendaraan Dinas Operasional/Lap. | 861.586.000 | 819.638.028 | 95,13 |
|  | - Pemeliharaan Peralatan dan mesin  lainnya | 60.000.000 | 59.424.000 | 99,04 |
|  | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | 120.044.000 | 118.584.000 | 98,78 |
| 9 | **Program Rencana Perlindungan dan**  **Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / kota** | **255.000.000** | **240.240.990** | **94,21** |
|  | - Penyusunan dan Penetapan RPPLH  Kabupaten / kota | 100.000.000 | 96.759.540 | 96,76 |
|  | - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH  Kabupaten / kota | 155.000.000 | 143.481.450 | 92,57 |
| **10** | **Program Penyelengaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabuoaten/ kota** | **119.000.000** | **115.370.120** | **96,95** |
|  | - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata ruang | 119.000.000 | 115.370.120 | 96,95 |
| 11 | Program Pencegahan Pencemaran  dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ kota | **2.664.044.700** | **2.566.775.946** | **94,86** |
|  | - Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah,Air,Udara dan  laut | 1.630.946.000 | 1.582.998.100 | 96,95 |
|  | - Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi gas rumah kaca.Mitigasi dan adaptasi  Perubahan Iklim | 320..000.000 | 298.570.500 | 93,30 |
|  | - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / kota | 713.098.700 | 685.607.346 | 96.14 |
| **12** | **Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**  **Hidup Kabupaten / kota** | **414;430.000** | **407.459.600** | **98.32** |
|  | - Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 414.430.000 | 407.459.600 | 98.32 |
| **13** | **Program Penyimpanan Sementara**  **Limbah B3** | **6.784.000** | **6.784.000** | **100** |
|  | - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui system  pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 6.784.000 | 6.784.000 | 100 |
| **14** | **Program Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten**  **/Kota** | **1.551.000.000** | **813.041.000** | **51,78** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka  Pengangkutan,pemanfaan,Pengelolaan,da n atau Penimbunan | 1.551.000.000 | 803.041.000 | **51,78** |
| **15** | **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH**  **diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kota** | **87.971.200** | **78.031.800** | **88.70** |
|  | - Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan  Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 35.300.000 | 34.700.000 | 98,30 |
| . | -Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan izin Lingkungan Hidup,Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten/kota | 52.671.200 | 43.331.800 | 82.27 |
| **16** | **Program Penyelenggaraan Pendidikan.Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah**  **Kabupaten/Kota** | **199.721.900** | **192.179.500** | **96,47** |
|  | - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang Lingkungan  Hidup unt.Lembaga Kemasyarakatan | 36.000.000 | 35.999.700 | 100 |
|  | -Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 163.221.900 | 156.179.800 | 95,69 |
| **17** | **Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)**  **Kab./kota** | **19.050.000** | **18.345.600** | **96.30** |
|  | -Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota | 19,050,000 | 18.345.600 | 96.30 |
| **18** | **Program Pengelolaan Sampah** | **9.192.850.000** | **8.002.790.991** | **87,05** |
|  | -Penyusunan Kabijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah Kab/kota | 288.850.000 | 283.353.150 | 98,10 |
|  | -Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengangkutan, pengumpulan,pengolahan dan Pemprosesan akhir sampah di TPA  /TPST/SPA Kab/kora | 6.974.000.000 | 6.060.157.841 | 86,90 |
|  | -Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan sampah | 80.000.000 | 77.120.000 | 96,40 |
|  | - Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di  TPA/TPST/SPA Kab/kota | 1.850.000.000 | 1.582.160.000 | 85,52 |
| **Jumlah** | | **33.314.895.598** | **30.273.570.298** | **90,90** |

## HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

* + 1. **PENDAPATAN**

Pada tahun 2021 terdapat pendapatan yang realisasi anggarannya kurang antara lain :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendapatan** | **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **Anggaran (Rp)** | **(%)**  **((4) / (3))** | **Penjelasan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Retribusi Pelayanan persampahan** | **1500.000.000** | **1.209.442.250** | **81%** | **Pandemi Covid 19 sehingga banyak warga masyarakat yang usahanya tutup sehingga mengurangi pendapatan**  **masyarakat** |

## BELANJA

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja sehingga penyerapannya kurang antara lain :

Tabel Daftar Kegiatan yang realisasi / penyerapan anggarannya kurang dari 75 %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi**  **Anggaran (Rp)** | **Pencapaian**  **Kinerja (%)((4)/(3))** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Program Adminitrasi Umum**  **Perangkat Daerah** | **60.000.000** | **29.445.950** | **49.08** |
|  | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 29.445.950 | **49.08** |
| 2 | **Program Penyediaan Jasa Penunjang**  **Urusan Pemerintah Daerah** | **294.996.000** | **207.012.384** | **70,17** |
|  | - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik | 294.996.000 | 207.012.384 | **70,17** |
| 3 | **Program Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten**  **/Kota** | **1.551.000.000** | **813.041.000** | **51,78** |
|  | -Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka  Pengangkutan, pemanfaan, Pengelolaan, dan atau Penimbunan | 1.551.000.000 | 813.041.000 | **51,78** |
|  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **1.905.996.000** | **1.049.499.334** | **55,06** |

## ENTITAS AKUNTANSI

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Entitas akuntansi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

## BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 217 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sedangkan sistem akuntansinya diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Adapun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

## BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

## Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada

saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

* + - * 1. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah diterima atau dikeluarkan;
        2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
        3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
| Lancar  < 1 tahun | Kurang Lancar  1 s.d. 2 tahun | Diragukan  >2 s.d. 5  tahun | Macet  >5 tahun |
| Piutang Pajak Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
| Lancar  0 s.d. 1 bulan | Kurang Lancar  >1 s.d. 3  bulan | Diragukan  >3 s.d. 12  bulan | Macet  >12  bulan |
| Piutang Retribusi Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
| Lancar  0 s.d. 1 bulan | Kurang Lancar  >1 s.d. 3  bulan | Diragukan  >3 s.d. 12  bulan | Macet  >12  bulan |
| Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

* + - * 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
        2. Persediaan dicatat sebesar:

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

* + - * 1. Persediaan dinilai dengan menggunakan **Metode Masuk Pertama Keluar Pertama** yang dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2021.
        2. Sistem pencatatan persediaan dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

**Metode Perpetual**, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

**Metode Periodik**, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

## Aset Tetap

* + - * 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
        2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri dari:

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

Jalan , Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

* + - * 1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

* + - * 1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah Harga**  **Lusin/Set/Satuan** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan** | |
| 1 | Tanah | Rp. | 0,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas : |  | |
| 2.1 | Alat Besar | Rp. | 300.000,00 |
| 2.2 | Alat Angkutan | Rp. | 300.000,00 |
| 2.3 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp. | 300.000,00 |
| 2.4 | Alat Pertanian | Rp. | 300.000,00 |
| 2.5 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. | 300.000,00 |
| 2.6 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | Rp. | 300.000,00 |
| 2.7 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp. | 300.000,00 |
| 2.8 | Alat Laboratorium | Rp. | 300.000,00 |
| 2.9 | Alat Persenjataan | Rp. | 300.000,00 |
| 2.10 | Komputer | Rp. | 300.000,00 |
| 2.11 | Alat Eksplorasi | Rp. | 300.000,00 |
| 2.12 | Alat Pengeboran | Rp. | 300.000,00 |
| 2.13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian | Rp. | 300.000,00 |
| 2.14 | Alat Bantu Eksplorasi | Rp. | 300.000,00 |
| 2.15 | Alat Keselamatan Kerja | Rp. | 300.000,00 |
| 2.16 | Alat Peraga | Rp. | 300.000,00 |
| 2.17 | Peralatan Proses/Produksi | Rp. | 300.000,00 |
| 2.18 | Rambu-Rambu | Rp. | 300.000,00 |
| 2.19 | Peralatan Olah Raga | Rp. | 300.000,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: |  | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | Rp. 10.000.000,00 | |
| 3.2 | Monumen | Rp. 10.000.000,00 | |
| 3.3 | Bangunan Menara | Rp. 10.000.000,00 | |
| 3.4 | Tugu titik Kontrol/Pasti | Rp. 10.000.000,00 | |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang terdiri atas: |  | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | Rp. | 0,00 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | Rp. | 0,00 |
| 4.3 | Instalasi | Rp. | 0,00 |
| 4.4 | Jaringan | Rp. | 0,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: |  | |
| 5.1 | Bahan Perpustakaan | Rp. | 0,00 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan  /Olahraga | Rp. | 0,00 |
| 5.3 | Hewan |  | |
| 5.4 | Biota Perairan | Rp. | 0,00 |
| 5.5 | Tanaman | Rp. | 0,00 |
| 5.6 | Barang Koleksi Non Budaya | Rp. | 0,00 |
| 5.7 | Aset Tetap dalam Renovasi | Rp. | 0,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp. | 0,00 |

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan,

nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

1. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
2. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehinggga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan bongkar muat (*handling cost*);
3. Biaya pemasangan (installation cost);
4. Biaya professional seperti arsitek dan insinyur;
5. Biaya konstruksi;
6. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi dan tidak menambah nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. (Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Bab X Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap)
2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai

output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

1. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
2. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.
   * + - 1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
         2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

## Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

## Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

# Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

1. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

1. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

## Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

# Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

1. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

1. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

# Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

1. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

# Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

## Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan

fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Perolehan ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Perolehan ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang

meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (*neto*) bagi entitas.

Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB. Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan setiap akhir periode dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas seperti goodwill tidak boleh diamortisasi.

* + - * 1. **Aset Lain-lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, yang disebabkan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain- lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## Pengukuran Pendapatan-LRA

* + - 1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara

penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

* + - 1. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
      2. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan.
      3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi.
      4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## Pengukuran Belanja

* + - 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
      2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
      3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
      4. Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

## Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

## Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

## Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

## Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak

Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earnaed*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
3. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.
4. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Asli Daerah-LO
     1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

* + - 1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

* + - 1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment.*

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official *assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen

sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

* + 1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

* + 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

* + 1. Lain-lain PAD yang Sah-LO
       1. Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

* + - 1. Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

* + - 1. Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

* + 1. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

* + 1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi

pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD *(realized).*

* + 1. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

## Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

1. Beban Barang
   1. Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan aset. Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

* 1. Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

1. Beban Hibah Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

1. Beban Bantuan Sosial Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

1. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penyusutan per periode | = | Harga Perolehan |
| Masa manfaat (dalam bulan) |

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodefikasi** | | | | **Uraian** | **Masa Manfaat**  **(Tahun)** |
| 1 | 3 |  |  | ASET TETAP |  |
| 1 | 3 | 2 |  | Peralatan dan Mesin |  |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat –alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat-alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat-alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga / Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodefikasi** | | | | **Uraian** | **Masa Manfaat**  **(Tahun)** |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Amunisi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 34 | Senjata Sinar | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 35 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 5 |
| 1 | 3 | 3 |  | Gedung dan Bangunan |  |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | Candi | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 07 | Monumen / Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol / Pasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu – Rambu | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara | 50 |
| 1 | 3 | 4 |  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan |  |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih /Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/ Air Bersih | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodefikasi** | | | | **Uraian** | **Masa Manfaat**  **(Tahun)** |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

1. Beban Penyisihan Piutang Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Beban Transfer Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

1. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

## PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

* + 1. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

* + 1. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir.

## BAB V

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1. **1. PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**
   1. **PENDAPATAN - LRA**

Realisasi Pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap TA 2021 dan TA 2021 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Daerah** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Retribusi pelayanan persampahan  /Kebersihan | 1.500.000.000 | 1.209.442.250 | 80.63 | 1.012.955.600 | 196.486.650 |
| 2 | Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah | 220.000.000 | 241.551.000 | 109.80 | 165.640.000 | 75.911.000 |
| 3 | Hasil Kerja sama  Pemanfaatan BMD | 0 | 327.751.000 | 0.00 | 0 | 327.751.000 |
| **Jumlah** | | **1.720.000.000** | **1.778.704.250** | **103.41** | **1.178.595.600** | **600.148.650** |

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan TA 2021 sebesar Rp, 1.209.442.250 atau 80.63 % dari anggarannya sebesar Rp 1.500.000.000. atau

119.39 % dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp. 1.012.955.000.

Realisasi Retribusi Pemakaian kekayaan daerah TA 2021 sebesar Rp. 241.551.000 atau

109.80 % dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 220.000.000. atau 145.2 % dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp. 165.640.000.

Realisasi Retribusi Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD TA 2021 sebesar Rp. 327.751.000 dari anggarannya sebesar Rp 0.00 atau 0.00 % dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 0.00.

Pendapatan retribusi Pelayanan persampahan /Kebersihan diatur dengan Perda no.03/2011 dan Pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah di atur Perda no. 17 tahun 2018, serta Realisasi Retribusi Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD TA 2021

Ditambahkan rincian pendapatan misalnya pendapatan retribusi pelayanan pasar-LRA sebagai berikut:

## BELANJA

Belanja meliputi Belanja Operasi (BO), dan Belanja Modal (BM). Anggaran dan realisasi belanja TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Daerah** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Operasi (BO) | 25.449.520.442 | 23.331.708.356 | 91,68 | 19.871.918.277 | 3.459.790.079 |
| 2 | Belanja Modal (BM) | 7.865.375.156 | 6.951.861.942 | 88,39 | 1.667.560.400 | 5.284.301.542 |
| **Jumlah** | | **33.314.895.598** | **30.283.570.298** | **90,90** | **21.539.478.677** | **8.744.091.621** |

Jumlah Realisasi Belanja pada TA 2021 sebesar Rp. 30.283.570.298 atau 90,90 % dari anggaran sebesar Rp. 33.314.895.598 dan 64,65% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp. 21.539.478.677 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Belanja Operasi (BO)

Belanja Operasi (BO) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap TA 2021 dan TA 2020 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Operasi (BO)** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja Pegawai | 8.760.847.863 | 8.367.279.826 | 95,51 | 7.919.085.056 | 448.194.770 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.688.672.579 | 14.964.428.530 | 89,68 | 11.952.833.221 | 3.011.595.309 |
| 3 | Belanja Hibah | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **25.449.520.442** | **23.331.708.356** | **95,43** | **19.871.918.277** | **3,459.790.079** |

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2021 sebesar Rp. 23.331.708.356 atau 95,43% dari anggaran sebesar Rp. 25.449.520.442 dan 78,08% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp. 19.871.918.277

## V.1.b.1)a) Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) realisasi seluruhnya dalam TA 2021 sebesar Rp. 8.367.279.826 atau 96,51 % dari anggarannya sebesar Rp. 8.760.847.863 atau 105,65 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp. 7.919.085.156

Realisasi belanja pegawai pada TA 2021 dan TA 2020 tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Pegawai:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja Gaji dan tunjangan | 5.011.689.863 | 4.881.544.831 | 97,40 | 5.003.873.186 | -122.328.355 |
| 2 | Belanja Tambahan  Penghasilan PNS | 3.433.536.000 | 3.233.089.995 | 94,16 | 2.915.211.970 | 317.878.025 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Pegawai:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 3 | Belanja Insentif Pemungutan  Pajak | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif  Lainnya ASN | 315.622.000 | 262.645.000 | 0 | 0 | 262.645.000 |
| 5 | Belanja Insentif Pemungutan  Retribusi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belanja Gaji dan Tunjangan  KDH/WKDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **8.760.847.863** | **8.367.279.826** | **96,50** | **7.919.085.156** | **458.194.670** |

## V.1.b.1)b) Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2021 sebesar Rp. 14.964.428.530 atau 89.67 % dari anggarannya sebesar Rp. 16.688.672.579 atau 125,19 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp. 11.952.833.221, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Barang dan Jasa** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja Barang | 7,182,486,585.00 | 6,496,499,285.00 | 90.45 | 1,767,980,500.00 | 4,728,518,785.00 |
| 2 | Belanja Jasa | 7,152,278,285.00 | 6,512,685,636.00 | 91.06 | 5,584,138,534.00 | 928,547,102.00 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 2,162,011,709.00 | 1,765,313,276.00 | 81.65 | 4,230,895,368.00 | (2,465,582,092.00) |
| 4 | Belanja Perjalanan | 167,596,000.00 | 165,630,333.00 | 98.83 | 302,275,819.00 | (136,645,486.00) |
| 5 | Belanja Untuk Diserahkan  Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 24,300,000.00 | 24,300,000.00 | 100.00 | 67,543,000.00 | (43,243,000.00) |
| **Jumlah** | | **16,688,672,579.00** | **14,964,428,530.00** | **89.67** | 11,952,833,221.00 | **3,011,595,309.00** |

## Belanja Modal (BM)

Realisasi Belanja Modal (BM) dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2021 dan TA 2020, sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Modal (BM):** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | BM-Tanah | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | BM-Peralatan & Mesin | 4.626.783.900 | 3.968.479.746 | 85.77 | 655.797.000 | -3.312.682.746 |
| 3 | BM-Gedung & Bangunan | 2.639.791.256 | 2.385.799.296 | 90.38 | 1.011.763.400 | -1.374.035.896 |
| 4 | BM-Jalan, Irigasi, & Jaringan | 598.800.000 | 597.582.900 | 99.8 | 0 | 597.582.900 |
| 5 | BM-Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | BM-Aset Tak Berwujud | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **7.865.375.156** | **6.951.861.942** | **88.39** | **1.667.560.400** | -5.284.301.542 |

Realisasi Belanja Modal (BM) pada TA 2021 sebesar Rp. 6.951.861.942 atau 88,39 % dari anggarannya sebesar Rp. 7.865.375.156 atau 416,88 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp.1.667.560.400. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

## V.1.b.2)a) BM-Tanah

Realisasi BM - Tanah TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi BM – Tanah untuk TA 2021 tersebut dipergunakan untuk pengadaan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Tanah** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## V.1.b.2)b) BM - Peralatan dan Mesin

Realisasi BM - Peralatan dan Mesin pada TA 2021 sebesar Rp. 3.968.479.746 atau 99,35 % dari anggarannya sebesar Rp. 4.626.783.900 atau 229,27 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp. 655.797.000 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Peralatan dan Mesin:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja Modal Alat Besar Apung | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat  Angkutan Darat Bermotor | 1.810.000.000 | 1.367.660.000 | 1143 | 119.685.000 | 1,247,975,000.00 |
| 3 | Belanja Modal Peralatan dan  Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 0 | 0 | - | 222.924.000 | (222,924,000.00) |
| 4 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut  Apung Darat Bermotor | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut  Apung Darat Tidak Bermotor | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Alat bengkel bermesin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Alat-alat ukur | 0 | 0 | - | 10.000.000 | (10,000,000.00) |
| 9 | Alat-alat pengolahan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | Alat Pemeliharaan  Tanaman/Alat Penyimpanan | 0 | 0 | - | 6.120.000 | (6,120,000.00) |
| 11 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 0 | 0 | - | 59.445.000 | (59,445,000.00) |
| 12 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah  Tangga | 1.130.100.000 | 945.236.600 | 415 | 228.223.000 | 717,013,600.00 |
| 13 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14 | Belanja Modal Komputer Unit | 112.384.000 | 99.715.000 | 1061 | 9.400.000 | 90,315,000.00 |
| 15 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi  Lingkungan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat  Laboratorium Lingkungan Hidup | 1.574.299.900 | 1.555.868.146 | - | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Peralatan dan Mesin:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 25 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan  Laboratorium Hidrodinamika | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **4.626.783.900** | **3.968.479.746** | **605,14** | **655.797.000** | **3,126,282,746.00** |

## V.1.b.2)c) BM-Gedung dan Bangunan

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan pada TA 2021 sebesar Rp.1.011.763.400 atau 99,19 % dari anggarannya sebesar Rp.1.020.000.000 atau 79,47 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp.1.273.062.400 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Gedung dan Bangunan** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Pengadaan Bangunan Gedung  Tempat Kerja | 2.639.791.256 | 2.385.799.296 | 90,38 | 1.011.763.400 | 1.374.035.896 |
| 2 | Pengadaan bangunan gedung tempat tinggal |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | 2.639.791.256 | 2.385.799.296 | 90,38 | 1.011.763.400 | 1.374.035.896 |

## V.1.b.2)d) BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 sebesar Rp597582900 atau 99,79 % dari anggarannya sebesar Rp 598.800.000 atau 100,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 598.800.000. dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | BM-Konstruksi Jalan | 199.600.000 | 199.317.200 | 99,86 | 0 | 199.317.200 |
| 2 | BM-Konstruksi Jembatan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Pengadaan Bangunan  pengaman sungai dan Penanggulangan BA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Pengadaan Bangunan  Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Pengadaan Bangunan air  bersih/baku | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Pengadaan Jaringan Air  Minum | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Pengadaan Bangunan Air Kotor | 399.200.000 | 398.265.700 | 99,77 | 0 | 398.265.700 |
| 9 | Pengadaan Jaringan listrik | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | Pengadaan Instalasi Air kotor | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan  Bangunan Air | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan  Instalasi Air Minum/Air Bersih | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ***Jumlah*** | | 598.800.000 | 597.582.900 | 99,79 | 0 | **597.582.900** |

## V.1.b.2)e) BM-Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya pada TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. terdiri dari:

0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM. Aset Tetap Lainnya** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Pengadaan buku | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Pengadaan Terbitan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Pengadaan barang bercorak kebudayaan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Pengadaan alat olahraga lainnya | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Pengadaan Aset Tetap Renovasi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Belanja Modal Dana BOS - Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **0** | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

## V.1.b.2)f)BM-Aset Tak Berwujud

Realisasi BM-Aset Tak Berwujud TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Modal Aset Tak Berwujud-LRA** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja Modal Aset Tak  Berwujud - Software |  |  |  |  |  |
| 2 | Belanja Modal Aset Tak  Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## V.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

* + 1. **ASET LANCAR**
       1. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupate**n** Cilacap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kode Rek** | **Pendapatan** | **Tahun 2021** | | **Tahun 2020** | |
| **Jumlah (Rp)** | **Tgl Disetor** | **Jumlah (Rp)** | **Tgl Disetor** |
| 1 |  | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Per 2021** | **Per 2020** |
| **Jumlah (Rp)** | **Jumlah (Rp)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekening Bendahara Pengeluaran | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

## Kas di BLUD

Rekening ini menggambarkan kas pada per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Per 2021** | **Per 2020** | **Keterangan** | **Rincian Nomor Rekening Bank** |
| **Jumlah (Rp)** | **Jumlah (Rp)** |
| 1 | Rekening BLUD |  |  |  |  |
| 2 | Bendahara Penerimaan |  |  |  |  |
| 3 | Bendahara Pengeluaran |  |  |  |  |
| 4 | Kas Lainnya |  |  |  |  |

## Kas di Bendahara BOS

Rekening ini menggambarkan sisa Dana BOS pada masing-masing sekolah penerima BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Sisa dana BOS per 31 Desember 2021 terdiri dari saldo kas bank BOS sebesar Rp0,00 dan saldo tunai sebesar Rp0,00.

## Piutang

Rekening ini menggambarkan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piutang** | | **Per 31 Des. 2021**  **(Rp)** | **Per 31 Des. 2020**  **(Rp)** |
| a) |  | 0,00 | 0,00 |
| b) |  | 0,00 | 0,00 |
| c) |  | 0,00 | 0,00 |
| d) |  | 0,00 | 0,00 |
| e) |  | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** |

## a) Rincian Piutang

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah daerah atas penerimaan pendapatan ... sesuai dengan ...., yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rincian Piutang** | | **Per 31 Des. 2021**  **(Rp)** | **Per 31 Des. 2020**  **(Rp)** |
| a. |  |  |  |
| b. |  |  |  |
| c. |  |  |  |
| d. |  |  |  |
| e. |  |  |  |
| f. |  |  |  |
| g. |  |  |  |
| h. |  |  |  |
| i. |  |  |  |
| j. |  |  |  |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** |

* + - * 1. Piutang BLUD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Piutang** | **Per 31 Des. 2021**  **(Rp)** | **Per 31 Des. 2020**  **(Rp)** |
| a) | Piutang Pasien Umum |  |  |
| b) | Piutang Pasien Perusahaan |  |  |
| c) | Piutang JKN/BPJS |  |  |
| d) | Piutang Askes |  |  |
| e) | Piutang Askes Inhealth |  |  |
| f) | Piutang Jamsostek |  |  |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** |

## Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing- masing sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00). Adapun rinciannya sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Per 31 Des. 2021**  **(Rp)** | **Per 31 Des. 2020**  **(Rp)** |
| **1** | **Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak** | **(0,00)** | **(0,00)** |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Reklame | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Air Tanah | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Hotel | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Hiburan | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Restoran | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Parkir | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPHTB | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih PBB-P2 | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan  Batuan | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Penerangan Jalan | (0,00) | (0,00) |
| **2** | **Penyisihan Piutang Tak Tertagih Retribusi** | **(0,00)** | **(0,00)** |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sewa Tanah | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Umum | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Perusahaan | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih JKN/BPJS | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Askes | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Askes Inhealth | (0,00) | (0,00) |
|  | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jamsostek | (0,00) | (0,00) |
| **JUMLAH** | | **(0,00)** | **(0,00)** |

## Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran premi asuransi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang masih memiliki masa manfaat kedepan (setelah tanggal neraca). Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| 1 | Premi Asuransi Kendaraan Dinas Pemda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Premi Asuransi Gedung Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Premi Asuransi Gedung Olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka (Oracle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | |  |  |  |  |

## Persediaan

Saldo rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Per 31 Desember**  **2021 (Rp)** | **Per 31 Desember**  **2020 (Rp)** |
| 1 | Persediaan Alat Tulis Kantor | 6.822.400 | 3.599.400 |
| 2 | Persediaan Alat Listrik dan Elektronik | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Persediaan Bahan Makanan Kering | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Persediaan Bibit Tanaman/Ternak/Ikan | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Persediaan Bahan Obat-obatan | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Persediaan Barang Cetakan | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Persediaan Bahan Makanan Pokok | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Persediaan Perangko,Materai dan Benda Pos  lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Persediaan bahan kimia dan pupuk | 0.00 | 13.738.907 |
| 10 | Persediaan Barang yang akan diserahkan  kepada masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Persediaan Bahan/Material Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Persediaan Isi Tabung Gas | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **6.822.400** | **17.338.307** |

Nilai persediaan yang disajikan tersebut belum termasuk persediaan dalam kondisi kadaluarsa, rusak atau usang.

Berdasarkan analisis horizontal Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

## ASET TETAP

Nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2021 diperoleh dari nilai Neraca per 31 Desember 2020 (*audited*) ditambah dengan mutasi selama Tahun 2021 berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sudah mengimplementasikan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Komposisi rekening Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aset Tetap** | **Per 31 Des. 2021 (Rp)** | **Per 31 Des. 2020 (Rp)** |
| 1 | Tanah | 8,297,607,170.00 | 8,369,007,170.00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 73,171,502,218.00 | 70,679,891,932.00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 18,532,324,153.00 | 16,587,557,819.00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 7,676,979,620.00 | 6,670,950,750.00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 44,946,000.00 | 44,946,000.00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (30,732,712,045.00) | (30,732,712,045.00) |
| **JUMLAH** | | 76.990.647.116 | 71.619.641.626 |

Mutasi Aset Tetap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **NAMA REKENING** | **SALDO AWAL** | **PENAMBAHAN** | **PENGURANGAN** | **SALDO AKHIR** |
| 1.3.1 | Tanah | 8,369,007,170.00 | 0,00 | 71,400,000.00 | 8,297,607,170.00 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 70,679,891,932.00 | 3,972,617,246.00 | 1,481,006,960.00 | 73,171,502,218.00 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 16,587,557,819.00 | 2,385,799,296.00 | 441,032,962.00 | 18,532,324,153.00 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan  Jaringan | 6,670,950,750.00 | 1,006,028,870.00 | 0,00 | 7,676,979,620.00 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 44,946,000.00 | 0.00 | 0,00 | 44,946,000.00 |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan | (30,732,712,045.00) | 0.00 | 0,00 | (30,732,712,045.00) |
|  | **TOTAL ASET TETAP** | 71,619,641,626.00 | **7,364,445,412.00** | **1,993,439,922.00** | 76,990,647,116.00 |

## Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 8,297,607,170.00,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.369.007.170,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp 71.400.000,00,00. Aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **8,369,007,170.00** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **0,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | 71.400.000,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **71.400.000,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **8,297,607,170.00,00** |

## Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 73,171,502,218.00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 70,679,891,932.00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 2,491,610,286.00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp. 3,972,617,246.00.00 dan pengurangan sebesar Rp. 1,481,006,960,00. Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **70,679,891,932.00** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 3.968.479.746,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 4.137.500,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **3,972,617,246,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 1.138.889.960,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | 4.137.500,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 342.117.000,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **1,481,006,960,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **73,171,502,218.00** |

## Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 18,532,324,153,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 16.587.557.819,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 1,944,766,334,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp. 2,385,799,296,00 dan pengurangan sebesar Rp. 441,032,962,00. Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **16,587,557,819.00** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 2,385,799,296,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **2,385,799,296,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 350,966,010,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| k | BM jadi barang extra comtable | 90,066,952,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **441,032,962,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **18,532,324,153,00** |

## Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7,676,979,620.00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6,670,950,750,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp 1,006,028,870,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp 1,006,028,870,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **6,670,950,750,00** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 597,582,900,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 393,545,970,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 14.900.000,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **1,006,028,870,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **0,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **7,676,979,620,00** |

## Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.946.000,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.946.00,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00. Aset tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **Rp44.946.000,00** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **0,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| j | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **0,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **Rp44.946.000,00** |

## Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Per 31 Des. 2021**  **(Rp)** | **Per 31 Des. 2020**  **(Rp)** |
| - Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa | 0,00 | 0,00 |
| - Tanah Kosong | 0,00 | 0,00 |
| - Bangunan Gedung Kantor | 0,00 | 0,00 |
| - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 0,00 | 0,00 |
| - Bangunan Pembuang Irigasi | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** |

## Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp30.732.712.045,00) dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp30.732.712.045,00) dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA REKENING** | **SALDO AWAL** | **PENAMBAHAN** | **PENGURANGAN** | **SALDO AKHIR** |
| Akumulasi Penyusutan  Peralatan dan Mesin | (28.179.455.694,00) | 0,00 | 0,00 | (28.179.455.694,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (1.697.895.453,00) | 0,00 | 0,00 | (1.697.895.453,00) |
| Akumulasi Penyusutan  Jalan, Irigasi, dan jaringan | (855.360.898,00) | 0,00 | 0,00 | (855.360.898,00) |
| Akumulasi Penyusutan  Aset Tetap Lainnya | (0,00) | 0,00 | 0,00 | (0,00) |
| **JUMLAH** | **(30.732.712.045,00)** | **0,00** | **0,00** | **(30.732.712.045,00)** |

## ASET LAINNYA

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset lainnya selain yang telah diklasifikasi ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aset Lainnya** | | **Per 31 Des 2021 (Rp)** | **Per 31 Des 2020 (Rp)** |
| a. | Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT) | 0,00 | 0,00 |
| b. | Aset Tidak Berwujud | 191.592.600,00 | 191.592.600,00 |
|  | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (107.770.837.5) | (59.872.687.5) |
| c. | Aset Lain-lain | 751.001.996.00 | 13,691,996.00 |
|  | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Aset Lainnya** | | **834.823.758,50** | **145,411,908,50** |

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp **834.823.758,50,50** dan Rp **145,411,908,50** dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 191.592.600,00 dengan Akumulasi amortisasi sebesar (Rp 107.770.837.50), dan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 191.592.600,00 dengan akumulasi amortisasi sebesar (Rp 107,770,837.50). Adapun rincian aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE REKENING** | **NAMA REKENING** | **NILAI PEROLEHAN**  **Per 31 desember**  **2021** | **AKUMULASI AMORTISASI** | **NILAI BUKU**  **Per 31 desember**  **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 |
|  | Kajian.. Penetapan Status Kerusakan Tanah dan atau Lahan untuk Produksi Biomassa | 45,266,000.00 | (25,462,125.00) | 19.803.875,00 |
|  | Program Pegembangan Kinerja Pengelolaan  Persampahan | 146,326,600.00 | (82,308,712.50) | 64,017,887.50 |
| **Jumlah** | | **191,592,600.00** | **(107,770,837.50)** | **83,821,762.50,00** |

## Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain adalah merupakan aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak berat) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp (1.379.378.400,00) dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar (Rp 628.376.404,00) dan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 13,691,996) dan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp 0,00.

## KEWAJIBAN

* + - 1. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

## Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00,yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SKPD** | **Per 31 Desember 2021**  **(Rp)** | **Per 31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| 1 | Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sewa Ruang ATM | 0,00 | 0,00 |
|  | DST |  |  |
| **JUMLAH** | | **0,00** | **0,00** |

## Utang Beban

Utang Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

* + - * 1. Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SKPD** | **Per 31 Desember**  **2021 (Rp)** | **Per 31 Desember 2020 (Rp)** |
| **1** | Utang Beban Pegawai (Insentif Pajak) | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Utang Beban Pegawai (Insentif Retribusi) | 0,00 | 0,00 |
| **3** | Utang Beban Pegawai (JKK JKM-Kt & Anggota DPRD) | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | 0,00 | 0,00 |

* + - * 1. Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 89.727.491,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 14.198.810,00.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SKPD** | **Per 31 Desember**  **2021 (Rp)** | **Per 31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| **1** | Utang Beban Barang dan Jasa (Listrik) | 85,894,707 | 10,954,019,00 |
| **2** | Utang Beban Barang dan Jasa i (telepon) | 583,084 | 601,791,00 |
| **3** | Utang Beban Barang dan Jasa i (air/PAM) | 3,249,700 | 2,643,000,00 |
| **2** | Utang Beban Barang dan Jasa i (internet) | 0.00 | 0,00 |
| **3** | DST |  |  |
| **Jumlah** | | 89.727.491,00 | 14,198,810,00 |

## Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

## EKUITAS

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan hak (*claim*) terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 77.742.565.783,50 dan Rp 71.768.193.031,50.

## PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban dan Surplus/defisit operasional.

## Pendapatan-LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Kabupaten Cilacap yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan – LO** | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| **Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO** | **1.778.704.250,00** | **1.178.595.600,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan – LO** | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| Pendapatan Pajak Daerah – LO | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 1.450.953.250,00 | 1.178.595.600,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  Dipisahkan – LO | 0,00 | 0.00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 327.751.000,00 | 0,00 |
| **Pendapatan Transfer – LO** | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO | 0,00 | 0.00 |
| Bantuan Keuangan – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO** | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Hibah – LO | 0,00 | 0.00 |
| Dana Darurat – LO | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Lainnya – LO | 0,00 | 0.00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah  Lainnya – LO | 0,00 | 0.00 |
| Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Jumlah** | **1.778.704.250,00** | **1.178.595.600,00** |

Saldo masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

## Pendapatan Asli Daerah - LO

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.778.704.250,00 dan Rp 1.178.595.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Asli Daerah – LO** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah – LO | 0,00 | 0.00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 1.450.953.250,00 | 1.178.595.600,00 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 327.751.000,00 | 0.00 |
| **Jumlah** | | 1.778.704.250,00 | 1.178.595.600,00 |

## V.4.a.1)a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Pajak Daerah – LO** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Hotel – LO | 0,00 | 0.00 |
| 2 | Restoran – LO | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Pajak Hiburan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 4 | Pajak Reklame – LO | 0,00 | 0.00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 6 | Pajak Parkir – LO | 0,00 | 0.00 |
| 7 | Pajak Air Tanah – LO | 0,00 | 0.00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet – LO | 0,00 | 0.00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO | 0,00 | 0.00 |
| 11 | BPHTB – LO | 0,00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan Pajak Daerah – LO** | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| **Jumlah** | **0,00** | **0.00** |

## V.4.a.1)b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2021 sebesar Rp 1,450,993,250.00 dan tahun 2020 sebesar Rp 1.178.595.600,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Retribusi Daerah – LO** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO | 1,209,442,250.00 | 1.012.955.600.00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO | 0,00 | 0.00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO | 0,00 | 0.00 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar – LO | 0,00 | 0.00 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO | 0,00 | 0.00 |
| 7 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO | 0,00 | 0.00 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO | 0,00 | 0.00 |
| 9 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO | 0,00 | 0.00 |
| 10 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO | 241,551,000.00 | 165.640.000.00 |
| 11 | Retribusi Terminal – LO | 0,00 | 0.00 |
| 12 | Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO | 0,00 | 0.00 |
| 13 | Retribusi Rumah Potong Hewan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 14 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 15 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga- LO | 0,00 | 0.00 |
| 16 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO | 0,00 | 0.00 |
| 17 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 18 | Retribusi Izin Gangguan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 19 | Retribusi Izin Trayek – LO | 0,00 | 0.00 |
| 20 | Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Jumlah** | | **1,450,993,250.00** | **1.178.595.600,00** |

## V.4.a.1)c) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2021 sebesar Rp 327,751,000.00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lain-lain PAD Yang Sah – LO** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO | 0,00 | 0.00 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro - LO | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Pendapatan Bunga – LO | 0,00 | 0.00 |
| 4 | Pendapatan Denda Pajak - LO | 0,00 | 0.00 |
| 5 | Pendapatan Denda Retribusi - LO | 0,00 | 0.00 |
| 6 | Pendapatan dari Pengembalian -LO | 0,00 | 0.00 |
| 7 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO | 327,751,000.00 | 0.00 |
| 8 | Pendapatan BLUD – LO | 0,00 | 0.00 |
| 9 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **327,751,000.00** | **0.00** |

## Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang terdiri atas:

## V.4.a.2)a) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Hibah – LO** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah- LO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat-LO | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan Dana BOS – LO | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** |

Pendapatan Hibah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah- LO

Hibah yang diterima tersebut berupa ..... dari Hibah Kementerian .....

1. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat – LO

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat sebesar Rp0,00 berupa....

Hibah yang diterima oleh sekolah-sekolah tersebut merupakan hibah aset oleh komite sekolah untuk masing-masing sekolah.

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri- LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri- LO sebesar Rp0,00 merupakan , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Dana BOS – LO

Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Hibah Dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah dari Pemerintah

...... dengan rincian sebagai berikut:

## V.4.a.2)b) Pendapatan Lainnya- LO

Pendapatan Lainnya – LO tahun 2021 sebesar Rp 0,00 adalah Pengakuan Pendapatan – LO yang berasal dari pengakuan piutang kerugian Daerah pada tahun 2021.

## V.4.b.Beban

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  **.** | **Beban** | **Belanja** |
| 1. | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas |
| 2. | Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional  (LO) | Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi  Angaran (LRA) |
| 3. | Menggunakan Kode Akun 9 | Menggunakan Kode Akun 5 |

## Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai - LO pada tahun 2021 sebesar Rp 8.367.279.826,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 7.919.085.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Pegawai-LO** | | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO | 4.881.544.831,00 | 5.003.873.086,00 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan ASN– LO | 3.233.089.995,00 | 2.915.211.970,00 |
| 3 | Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan  Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 262.645.000,00 | 0,00 |
| 6 | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Uang Lembur – LO | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **8.367.279.826,00** | **7.919.085.056,00** |

Perbedaan antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai- LRA adalah bahwa pada Beban Pegawai – LO memperhitungkan adanya transaksi – transaksi keuangan yang secara akrual sudah dapat mengurangi ekuitas atau menambah ekuitas tanpa menunggu adanya aliran kas masuk atau keluar sedangkan pada Belanja Pegawai untuk semua transaksi akan dicatat sebagai realisasi manakala ada aliran transaksi keluar.

## Beban Barang

Beban Barang pada tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 6,849,132,192.00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1,776,583,549.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Barang –LO** | | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| 1 | Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi | 294,958,222.00 | 251,704,600.00 |
| 2 | Beban Bahan Kimia | 210,210,807.00 | 179,895,499.00 |
| 3 | Beban Bahan Bakar dan Pelumas | 3,929,878,167.00 | 242,415,000.00 |
| 4 | Beban Bahan/Bibit Tanaman | 10,362,429.00 | 1,280,000.00 |
| 5 | Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 264,700.00 |  |
| 6 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 4,800,000.00 | 4,940,000.00 |
| 7 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 343,572,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Barang –LO** | | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 8 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 565,214,735.00 |  |
| 9 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 53,897,800.00 |  |
| 10 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis  Kantor | 79,101,825.00 | 43,563,300.00 |
| 11 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 68,153,850.00 | 52,128,200.00 |
| 12 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 7,620,000.00 | 4,681,000.00 |
| 13 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan  Komputer |  |  |
| 14 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot  Kantor | 10,065,607.00 |  |
| 15 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 21,187,000.00 | 13,460,500.00 |
| 16 | Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan  Pembersih |  | 174,288,850.00 |
| 17 | Beban Persediaan Dekorasi |  | 16,932,600.00 |
| 18 | Beban Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah  Tangga |  | 5,094,000.00 |
| 19 | Beban Persediaan Peralatan dan Perlengkapan  Laboratorium |  | 73,800,000.00 |
| 20 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan  Dinas |  |  |
| 21 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-  Suvenir/Cendera Mata | 119,720,000.00 |  |
| 22 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan  untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 4,650,000.00 |  |
| 23 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 2,680,000.00 |  |
| 24 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada  Masyarakat | 242,682,600.00 |  |
| 25 | Beban Natura dan Pakan-Natura |  |  |
| 26 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 253,010,300.00 | 56,945,000.00 |
| 27 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 19,749,000.00 | 1,996,750.00 |
| 28 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 434,085,750.00 | 462,528,850.00 |
| 29 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 990,000.00 | 46,520,000.00 |
| 30 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 4,050,000.00 | 128,209,400.00 |
| 31 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 168,227,400.00 | 16,200,000.00 |
|  | **Jumlah** | **6,849,132,192.00** | **1,776,583,549.00** |

## Beban Jasa

Beban Jasa pada tahun 2021 sebesar Rp 6,588,214,317.00 dan tahun 2020 sebesar Rp 5,582,123,293,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Jasa-LO** | | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,  Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 257,450,000.00 |  |
| 2 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan  Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 13,500,000.00 | 22,025,000.00 |
| 3 | Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi  Ahli, dan Beracara | 0 |  |
| 4 | Beban Honorarium Rohaniwan | 2,000,000.00 |  |
| 5 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 3,515,950,000.00 | 3,319,000,000.00 |
| 6 | Beban Jasa Tenaga Ahli | 48,960,000.00 | 41,300,000.00 |
| 7 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 0 |  |
| 8 | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 0 |  |
| 9 | Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan  Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 0 |  |
| 10 | Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 29,365,000.00 |  |
| 11 | Beban Jasa Audit/Surveillance ISO | 38,718,300.00 |  |
| 12 | Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 9,000,000.00 |  |
| 13 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | 2,450,000.00 |  |
| 14 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 32,500,000.00 |  |
| 15 | Beban Tagihan Telepon | 7,111,806.00 | 9,115,696.00 |
| 16 | Beban Tagihan Air | 37,042,050.00 | 23,081,300.00 |
| 17 | Beban Tagihan Listrik | 1,122,200,937.00 | 654,287,436.00 |
| 18 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 9,360,000.00 | 7,850,000.00 |
| 19 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 2,202,000.00 | 2,197,000.00 |
| 20 | Beban Registrasi/Keanggotaan | 0 |  |
| 21 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 64,910,500.00 | 24,722,400.00 |
| 22 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 185,087,856.00 | 167,917,686.00 |
| 23 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 10,693,382.00 | 17,027,955.00 |
| 24 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 13,366,726.00 |  |
| 25 | Beban Pengolahan Air Limbah | 19,100,000.00 |  |
| 26 | Beban Asuransi Barang Milik Daerah | 0 |  |
| 27 | Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 0 |  |
| 28 | Beban Sewa Electric Generating Set | 0 |  |
| 29 | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 2,000,000.00 |  |
| 30 | Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat | 950,000.00 |  |
| 31 | Beban Sewa Peralatan Studio Audio | 1,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Jasa-LO** | | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 32 | Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor | 3,600,000.00 |  |
| 33 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 0 |  |
| 34 | Beban Jasa Pihak Ketiga | 0 | 619,844,000.00 |
| 35 | Beban Honorarium Non PNS Lainnya - LO | 0 | 205,160,000.00 |
| 36 | Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -  LO | 0 | 4,500,000.00 |
| 37 | Beban Honorarium Petugas Pengelola Keuangan - LO | 0 | 292,295,000.00 |
| 38 | Beban Honorarium Petugas Pengelola Barang - LO | 0 | 4,800,000.00 |
| 39 | Beban Honorarium Petugas Pembuat Gambar/Design -  LO | 0 | 500,000.00 |
| 40 | Beban Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan  - LO | 0 | 3,200,000.00 |
| 41 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan  Bangunan dan Landscape | 342,347,110.00 | 118,093,820.00 |
| 42 | Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi  Lingkungan | 225,942,600.00 |  |
| 43 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi  Penelitian dan Bantuan Teknik | 513,812,750.00 | 90,000.00 |
| 44 | Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi  Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan |  |  |
| 45 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa  Khusus |  |  |
| 46 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 73,874,000.00 | 45,116,000.00 |
| 47 | Beban Sosialisasi | 3,719,300.00 |  |
|  |  | **6,588,214,317.00** | **5,582,123,293.00** |

## Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2021 sebesar Rp 1,855,380,228.00 dan tahun 2020 sebesar Rp 4,230,895,368,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Pemeliharaan** | | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Beban Jasa Service |  | 72,873,000.00 |
| 2 | Beban Penggantian Suku Cadang |  | 571,777,406.00 |
| 3 | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas |  | 2,916,054,500.00 |
| 4 | Beban Jasa KIR |  |  |
| 5 | Beban Pajak Kendaraan Bermotor |  | 53,731,100.00 |
| 6 | Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |  |  |
| 7 | Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan |  |  |
| 8 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya |  |  |
| 9 | Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin |  | 599,959,362.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Pemeliharaan** | | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 10 | Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan Kantor | 118,584,000.00 | 16,500,000.00 |
| 11 | Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan Pos Jaga | 90,066,952.00 |  |
| 11 | Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya |  |  |
| 12 | Beban Pemeliharaan Jalan |  |  |
| 13 | Beban Pemeliharaan Irigasi dan Drainase | 697,538,192.00 |  |
| 14 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan  Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Barang |  |  |
| 15 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan  Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 44,967,500.00 |  |
| 16 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-  Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 781,529,584.00 |  |
| 17 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-  Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 17,024,000.00 |  |
| 18 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-  Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 7,000,000.00 |  |
| 19 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal  Computer | 17,000,000.00 |  |
| 20 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-  Peralatan Personal Computer | 12,400,000.00 |  |
| 21 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan  Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio | 6,000,000.00 |  |
| 22 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-  Alat Laboratorium Uji Perangkat | 63,270,000.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | 1,855,380,228.00 | 4,230,895,368.00 |

## V.4.a.1) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2021 sebesar Rp. 165.630.333,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 302.275.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Beban Perjalanan Dinas** | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 165.630.333,00 |  |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota |  | 109,190,427.00 |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah |  | 193,085,392.00 |
|  | **Jumlah** | **165.630.333,00** | **302.275.819,00** |

## Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2021 sebesar Rp 24.300.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 9.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Beban Hadiah Untuk Diserahkan Kepada  Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 9.950.000,00 |
| 2 | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 24.300.000,00 |  |
| 3 | Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **24.300.000,00** | **9.950.000,00** |

## Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 57.593.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Beban Hibah** | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| 1 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang  Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk  Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga  Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki  Surat Keterangan Terdaftar | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Beban Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan  Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 0,00 | 57,593,000.00 |
|  | **Jumlah** | **0,00** | **57,593,000,00** |

## Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2021 sebesar Rp 47,898,150,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 7.718.910.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 7,029,907,259.00 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 504,033,238.00 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan | 0,00 | 184,970,018.00 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 47,898,150.00 | 47,898,150.00 |
| **Jumlah** | | **47,898,150,00** | **7.718.910.515,00** |

## Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Penyisihan Piutang** | | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** |

Terdapat selisih antara beban – LO dan belanja LRA sebesar Rp0,00 . Penjelasan selisih beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

## V.4.b.Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2021 sebesar Rp (22.119.130.796,00) dan tahun 2020 adalah sebesar (Rp 26.706.279.510,00).

## V.4.c. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00. Surplus Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp0,00 yang merupakan Surplus Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp0,00 dan Surplus Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebesar Rp0,00.

## V.4.d.Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus dari Non Operasional Lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 yang merupakan pengakuan Pendapatan LO dan Piutang Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp0,00.

## V.4.e. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00. Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp0,00 merupakan defisit penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp0,00 dan defisit penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebesar Rp0,00.

## V.4.f. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit dari Non Operasional Lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 merupakan Pengakuan Beban Non Operasional atas sebesar

Rp0,00.

## V.4.g.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional pada tahun 2021 sebesar minus Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00.

## V.4.h.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00.

## V.4.i. Pos Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar (22.119.130.796,00) dan tahun 2020 adalah sebesar 0,00.

## PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 71.768.193.031,50 berasal dari saldo awal Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp 77.964.899.262,00 ditambah Surplus/Defisit - LO tahun 2021 sebesar Rp (22.119.130.796,00) ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp 411.362.500,00.

## V.5.a.Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 71.768.193.031.5,00 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2020.

## V.5.b.Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO tahun 2021 sebesar Rp (22.119.130.796,00) berasal dari Pendapatan – LO sebesar Rp 1.778.704.250,00 dikurangi Beban sebesar Rp 23.897.835.046,00 dikurangi Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp 0.00. ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 28.504.866.048,00.

## V.5.c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2021 sebesar Rp 411.362.500,00 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 148.690.202,50. Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2021 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **NOMINAL (Rp)** | **KETERANGAN** |
| 1 | Koreksi Nilai Kas |  |  |
| 2 | Koreksi Nilai Piutang |  |  |
| 3 | Koreksi Nilai Persediaan |  |  |
| 4 | Koreksi Nilai Aset Tetap |  |  |
|  | Kurang Catat |  |  |
|  | Penghapusan dengan SK | - 359.000.000,00 |  |
|  | Mutasi dari SKPD Lain | 19.037.500,00 | Dikembalikan dari SKPD lain |
|  | Mutasi ke SKPD Lain | - 71.400.000,00 | Droping ke SKPD lain |
|  | Penjualan aset tetap |  |  |
| 5 | Koreksi Nilai Akumulasi Aset Tetap |  |  |
|  | Koreksi Nilai Akumulasi Aset Tetap |  |  |
| 6 | Koreksi Nilai Aset Lain-lain |  |  |
|  | Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud |  |  |
| 7 | Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan |  |  |
| 8 | Koreksi Nilai Kewajiban |  |  |
| 9 | Koreksi Pendapatan LO |  |  |
|  | JUMLAH | Rp - 411.362.500,00 |  |

## BAB VI

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

* 1. **INFORMASI UMUM MENGENAI SKPD**
     1. Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016

* + 1. Tugas

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

* + 1. Susunan organisasi

Berdasarkan Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap memiliki Struktur organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

* + - * Kepala;
      * Sekretariat, terdiri dari :
        + Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
        + Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
      * Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        + Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
        + Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
        + Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
      * Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
        + Seksi Pengelolaan Sampah;
        + Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
        + Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
      * Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        + Seksi Pencemaran Lingkungan;
        + Seksi Kerusakan Lingkungan;
        + Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
      * UPTD; dan
      * Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap baik. Hal ini tergambar dari pencapaian efektifitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Dari anggaran sebesar Rp. 1,720,000,000.00 Realisasi Pendapatan Rp. 1,778,704,250.00

TA 2021 atau 103.41 % dari anggarannya, dan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 atau 102,94% dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp. 1.178.595.600.

1. Belanja

Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp. 30.283.570.298,00 atau 90,90 % dari anggarannya sebesar Rp. 33.314.895.598 atau 88,79% dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp. 21.824.992.703,00.

1. Aset

Aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2021 terdiri dari:

* 1. Persediaan sebesar Rp. 6.822.400 (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
  2. Aset tetap sebesar Rp. 76.990.647.116,00 (Tujuh Puluh Enam Miliyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam belas rupiah).
  3. Aset lain-lain sebesar Rp. 834.823.758.5 ( Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan koma Lima Rupiah).

Adapun kendala dan hambatan yang kami hadapi terutama dalam hal :

1. Keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Keuangan
2. Peraturan Perunadang-undangan yang selalu berubah-ubah
3. Peralatan internet yang sering gangguan/trouble
4. Pandemi Covid 19

Namun demikian berbagai upaya telah kami lakukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Cilacap, 31 Desember 2021

## Pengguna Anggaran

**SRI MURNIYATI,ST,.M.Si NIP. 19700910 199703 2 005**